

PATOLOGI BIROKRASI
(Studi Kasus Kantor Camat Darul Imarah Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FIARY SOFWANDA UTAMI
NIM. 140802046

Mahasiwi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar S-1 dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

FIARY SOFWANDA UTAMI

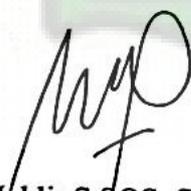
NIM. 140802046

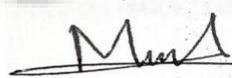
Disetujui Oleh:

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muklir, S.SOS., S.H., M.AP
NIP: 19700602002121002


Muazzinah, M.AP
NIDN.2017127407

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Dan
dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara**

**Diajukan oleh:
FIARY SOFWANDA UTAMI
NIM. 140802046**

Pada Hari Kamis/Tanggal:

7 Januari 2019

1 Jumadil Awal 1440 H

**Di: Darussalam - Banda
Aceh**

Panitia Ujian Sidang Munaqasyah

Ketua



Dr. Muklis, S.sos, S.H., M.AP
NIP. 19700602002121002

Sekretaris



Muazzinah, B.Sc., M.AP
NIDN. 2017127407

Penguji I



Taufik, S.sos., M.Si
NIDN. 2018058903

Penguji II,



Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP. 199002282018032001

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**



Dr. Eripta Dewy S. Ag., M. Hum
NIP. 197307132000032002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fiary Sofwanda Utami
Nim : 140802046
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/ paksaan oleh siapapun.

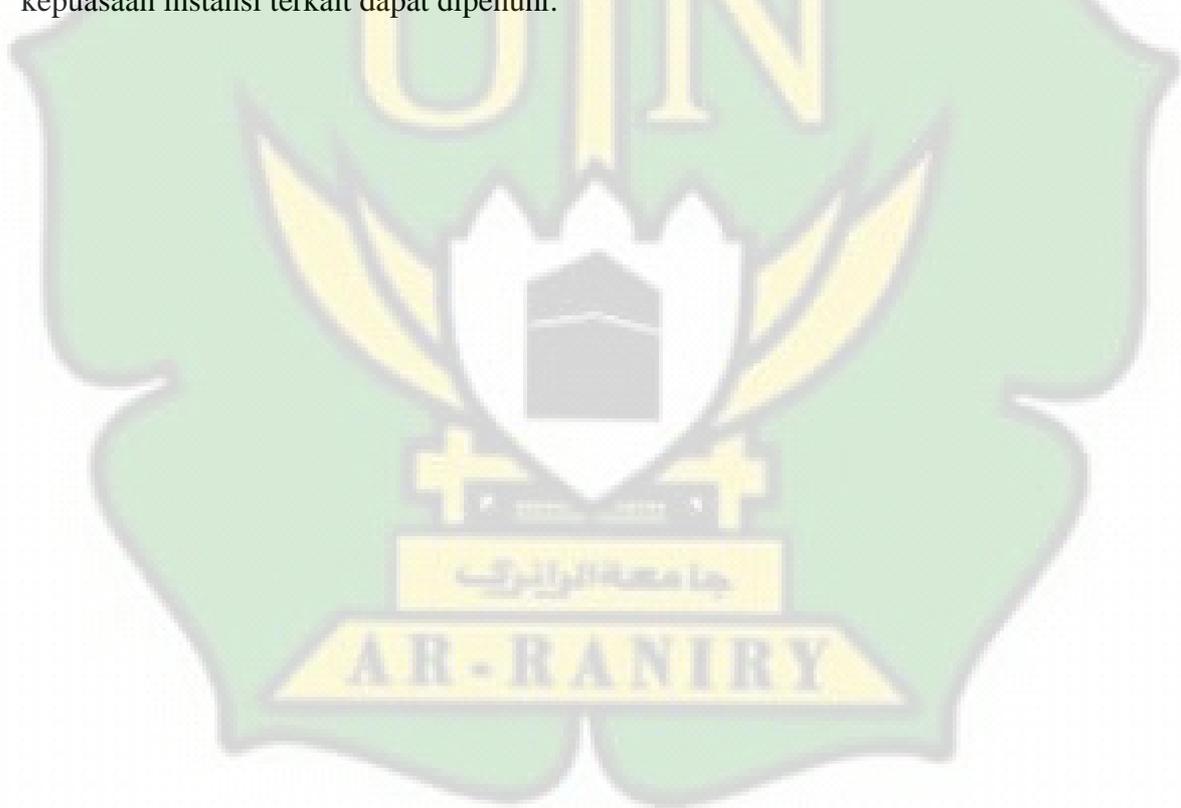
Banda Aceh, 21 Desember 2018



(Fiary Sofwanda Utami)

ABSTRAK

Patologi Birokrasi adalah Penyakit, perilaku negative, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik. Namun pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dikalangan pemerintahan. Salah satunya ada pada kantor Camat Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk patologi birokrasi di Kantor Camat Darul Imarah dan Upaya-upaya mengatasi Patologi di Kantor Camat Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan Penelitian Menggunakan Penelitian Kualitatif, dengan metode penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kedisiplinan di kantor Camat Darul Imarah Aceh Besar masih kurang Optimal, hal ini dapat dilihat dari absensi kehadiran yang relatif banyak yang tidak hadir serta beberapa laporan Masyarakat yang Mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan. Harapannya kantor Camat Darul Imarah Aceh Besar mampu Meningkatkan kedisiplinan dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga menjadi lebih optimal dan kepuasan instansi terkait dapat dipenuhi.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Patologi Birokrasi (Studi Kasus Kantor Camat Darul Imarah Aceh Besar)”. Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi demi memperoleh gelar sarjana ilmu Administrasi Negara pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sholawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Rasulullah SAW yang mulia.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, penulis persembahkan kepada yang terhormat :

1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M, Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Muklir, M.AP dan Muazzinah, M.AP selaku Dosen Pembimbing I dan II, dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dukungan mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini kepada penulis.
3. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan guna dijadikan data pada penelitian ini.
5. Ayahanda Ridwan dan ibunda Sofiatuddin serta adik tercinta Febrya Monanda yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan moril maupun materil yang tiada henti sehingga skripsi ini selesai. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat.

6. Para sahabat terbaik penulis, teman-teman mahasiswa/i angkatan 2014 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan banyak motivasi dan bantuan dalam menulis skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari segi penyajian, bahwa, maupun segi materi. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sehingga akan memberikan suatu informasi yang berguna bagi ilmu pengetahuan . Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca menjadi bahan belajar dan inspirasi untuk menciptakan karya yang lebih bagus lagi.

Banda Aceh, 27 Desember 2018

Penulis,

Fiary Sofwanda Utami

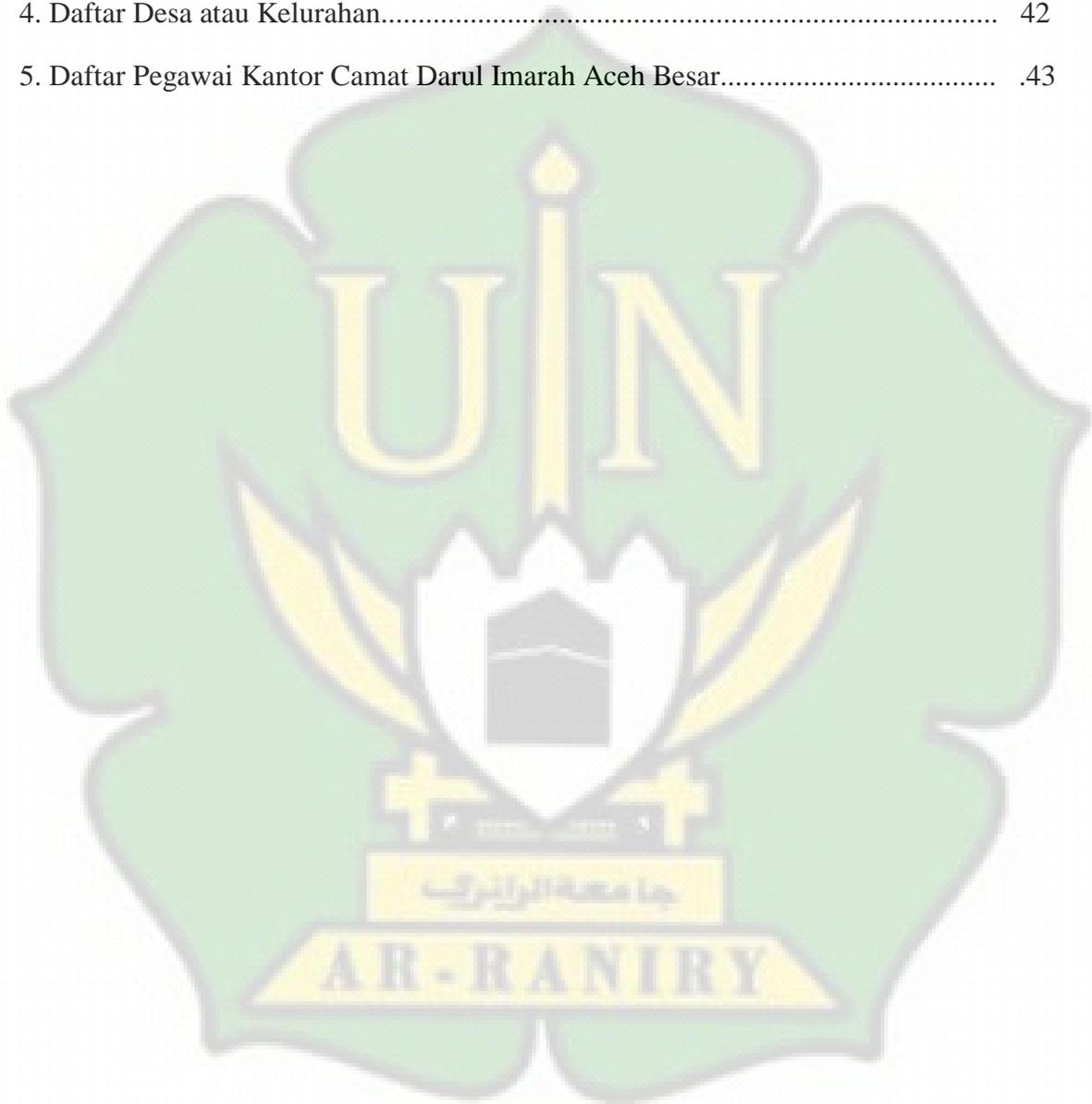
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENERIMAAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I :PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2Manfaat Praktis	7
1.4.3.Manfaat Khusus	7
BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN	8
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Konsep Birokrasi.....	18
2.3 Patologi Birokrasi	18
2.4 Kedisiplinan Pegawai.....	18
2.5 Peraturan Pemerintah NO 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Kedisiplinan Pegawai	20
2.6 Etika Birokrasi	22
2.7 Etika dalam pemerintahan.....	23
2.8 Sikap dan Prilaku	26
2.9 Prilaku Organisasi Dan Prilaku Kejujuran Bekerja Saling Berdampak Positif	30
2.10 <i>Good Governance</i> (Pemerintahan yang baik)	35
2.11 Hakikat Dasar <i>Good Governance</i> (Kepemerintahan yang Baik).....	36
2.12 Kerangka Berpikir	36
BAB III : METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Jenis Data.....	39
3.3.1 Data Primer.....	39
3.3.2 Data Skunder	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40

3.5 Teknik Analisis Data	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum lokasi penelitian.....	41
4.1.1 Profil Kantor Camat Darul Imarah Aceh besar.....	41
4.1.2 Daftar Nama Pegawai Kantor Camat Darul Imarah Aceh Besar.....	41
4.2 Hasil Penelitian Kantor Camat Darul Imarah Aceh Besar.....	43
4.2.1 Bentuk-bentuk patologi birokrasi dikantor Camat Darul Imarah Aceh Besar.....	43
4.2.2 Upaya mengatasi patologi birokrasi dikantor Camat DarulImarah Aceh Besar.....	49
4.3 Pembahasan Kantor Camat Darul Imarah Aceh Besar.....	52
4.3.1 Bentuk-bentuk patologi birokrasi dikantor Camat Darul Imarah Aceh Besar.....	52
4.3.2 Upaya mengatasi patologi birokrasi dikantor Camat Darul Imarah Aceh Besar.....	52
BAB V : PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
2. Perbedaan <i>Government</i> dan <i>Good Governance</i>	36
3. Lokasi Penelitian.....	37
4. Daftar Desa atau Kelurahan.....	42
5. Daftar Pegawai Kantor Camat Darul Imarah Aceh Besar.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Aceh Besar

Lampiran 6 : Biografi Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu lembaga yang berlangsung dari kehidupan masyarakat yaitu hubungan antar manusia dengan setiap kelompok. Pemerintah memegang tanggung jawab atas kepentingan rakyat. Namun pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dikalangan pemerintah atau yang disebut patologi birokrasi. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur perilaku dari para aparat pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yang baik didalam birokrasi, dan menjalankan fungsi akuntabilitas.¹

Birokrasi merupakan instrument penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa Negara mempunyai misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya². Namun pada kenyataan banyak terjadi penyimpangan dikalangan pemerintahan.

Patologi birokrasi dalam arti kata lain adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan. Menurut Sondang P. Siagian³. secara umum, Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial kultural dan teknologikal.

Pada akhirnya cita-cita hidup dalam bernegara dengan konsep *good governance* tidak tercapai, karena *good governance* terwujud jika *clean governance* terealisasi

¹ Limbat, Fikry. dkk. 2017, "Prilaku Birokrasi Dalam Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongowdown". Volume 2.No.2

² Ahmad, Badu. 2008 "kondisi birokrasi diindonesia dalam hubungannya dengan pelayananan public". pkp2A II LAN Makassar. Volume IV, No.1. hal-47

³ Siagian P Sondang, *Patologi Birokrasi Analisis*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984. hal 35

dengan baik, dan hal tersebut akan ada apabila praktik KKN tidak berkuasa di instansi-instansi lembaga pemerintah. Saat ini perlu tindakan ekstra dalam memutar-balikan haluan yang telah lama terperangkap di koridor yang salah.

Money of the king, mungkin pepatah tersebut sangat lazim kita dengar. Ashley seorang pakar pemerintah di Amerika mengatakan bahwa uang menciptakan kesejahteraan, namun uang menyebabkan perpecahan. Hal tersebut diungkapkannya terkait dengan proses lembaga pemerintah yang mengalami pasang surut, saling berlomba mencari untung, tidak lagi memikirkan tupoksi sebagai birokrasi, yang ada hanya kepentingan pribadi. Lalu pada akhirnya sebuah negara hancur, karena ulah perbuatan mereka (para birokrat).

Aceh merupakan maniferstasi dari konsep otonomi khusus yang dikehendaki oleh *MoU* Helsinki. Dimana Aceh diberikan hak khusus dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu pelaksanaan otonomi khusus yang dituangkan dalam butir-butir pasal UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁴ alih-alih motor pergerakan perjuangan dahulu membuahkan hasil di saat sekarang ini, walalupun tujuan utama untuk sebuah kemerdekaan Aceh, namun yang didapatkan saat sekarang ini melebihi sebuah negara. Keistimewaan yang diberikan pemerintahan pusat berupa berlimpahnya anggaran, Pemda Aceh diberikan wewenang mengatur daerah nya sendiri (Sesuai dengan UU 1945), Pemda Aceh di perbolehkan membentuk partai politik local, dan masih banyak lainnya.

Tercatat dari tahun 2005 hingga sekarang, seharusnya aceh menjadi salah-satu daerah yang begitu gemilang karena pembangunan.Namun nyatanya, Aceh yang di karuniai anggaran yang berlimpah mendapatkan pandangan yang tidak sopan dari Pusat

⁴ Ulya,Zaki,2014." Refleksi *Memorendum of Understanding (MOU)* Helsinki dalam kaitan makna Otonomi Khusus diAceh."hal-375. Diakses tanggal 10 mei .

dan daerah-daerah lainnya karena ketertinggalan pembangunan daerah, yang juga disebabkan oleh maraknya kesalahan-kesalahan dan juga patologi birokrasi.

Salah-satu patologi birokrasi adalah perilah ketidakdisiplinan atau berada diluar kantor pada jam kerja tanpa adanya surat tugas dinas luar. Hal demikian dapat dilihat dari berita “Kumparan News” yang di unduh pada Mei 2018 dijelaskan bahwa, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkungan kerja Kecamatan Darul Umarah terjaring razia Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Besar, akibat kedatangan sedang nongkrong di warung kopi saat jam kerja, pada hari senin tanggal 12 maret 2018.⁵

Pihak satpol PP dan WH dalam melakukan penertiban kepada (PNS) yang ada di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar dengan menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik PNS yang terjaring razia, KTP tersebut akan dikembalikan pada saat pembinaan. Selain mendapatkan pembinaan dari Satpol PP dan WH, para PNS juga mendapatkan binaan lanjutan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap pegawai yang tidak disiplin tersebut dengan cara disurati oleh Satpol PP dan WH kepada pihak dinas untuk memberikan binaan secara internal.

Dari observasi awal yang peneliti temukan di lapangan, terdapat PNS Kantor Camat yang masih berada diluar Kantor diatas pukul 09.00 WIB, sedangkan pada ketetapan waktu hadir PNS dikantor Camat harus pukul 08.00 WIB, dengan demikian akan berdampak pada pemanfaatan waktu yang kurang optimal. Kondisi diatas menggambarkan, bahwa maraknya patologi birokrasi saat ini semakin meningkat, dan hal sepele diatas jika dibiarkan terus akan berdampak pada hal yang besar, karena perilaku buruk yang diterapkan merupakan cikal bakal untuk hal buruk yang lebih besar.

⁵<http://kumparan.com/@kumparannews/satpol-pp-ciduk-pns-aceh-besar-diwarung-kopi-pada-saat-jam-kerja>, diakses tanggal 12 mei 2018

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka saya akan meneliti tentang
“PATOLOGI BIROKRASI (Kantor Camat Darul Imarah Aceh Besar)”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang ada di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk – bentuk Patologi Birokrasi yang ada Di Kantor Camat Darul Iamarah Kabupaten Aceh Besar ?
2. Upaya Mengatasi Patologi Birokrasi Di Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk – bentuk patologi birokrasi yang ada Di Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk Mengetahui Upaya Mengatasi Patologi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang kebijakan, pemerintahan, dan ilmu sosial. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi masyarakat dan pemerintah agar dapat memperhatikan eksistensi dan banyaknya permasalahan yang harus diperhatikan secara mendalam di lingkungan birokrasi pemerintahan Aceh.

- 2 Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan dasar para akademisi, peneliti dan para praktisi pemerintahan/politik yang ingin mengkaji tentang patologi birokrasi di daerah kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh instansi yang bersangkutan sebagai bentuk media publikasi terhadap banyaknya permasalahan yang harus di perhatikan secara mendalam.

3 Manfaat khusus

Manfaat khusus dari penelitian ini adalah menambah wawasan bagi peneliti dan menambah keilmuan tentang permasalahan yang akan diteliti tersebut khususnya dalam bidang kebijakan, politik ataupun pemerintahan.

